

# *Djalan Baru*



## *Untuk Republik Indonesia*

Jajasan "Pembaruan"

Djakarta 1953

# *Djalan Baru Untuk Republik Indonesia*

Rentjana Resolusi Polit-Biro untuk dimajukan pada Kongres ke-V dari Partai Komunis Indonesia. Disetujui oleh Konperensi PKI pada tanggal 26 dan 27 Agustus 1948

Tjetakan ke-VII

(Jajasan "Pembaruan" Djakarta 1953)

Modified & Authorised by: Edi Cahyono, Webmaster  
Disclaimer & Copyright Notice © 2005 Edi Cahyono's Experience

## Kata pengantar

Dengan penerbitan ini entah berapa puluh ribu “*Djalan Baru*” sudah disiarkan. Sedjak terbitnja, bulan Agustus 1948, “*Djalan Baru*” sudah disiarkan dengan segala matjam djalan: ditjetak, distensil, ditik, dan ditulis. Ia ditjetak di Djawa, ia ditjetak diluarnegeri oleh Partai sekawan, ia distensil di Sumatera, Sulawesi, dll. Pendeknja, “*Djalan Baru*” sudah banjak tersiar. Walaupun demikian, mengingat pentingnja isi buku ketjil ini, kita berpendapat bahwa “*Djalan Baru*” belum tjukup banjak disiarkan. Oleh karena itu, kali ini kita terbitkan lagi “*Djalan Baru*”. Kita akan sangat bergembira djika djuga diusahakan penerbitan jang banjak dalam bahasa<sup>2</sup> daerah seperti bahasa Djawa, Sunda, Madura, Minangkabau, Bugis dll.

“*Djalan Baru*” tidak hanja penting untuk anggota dan tjalon-anggota PKI. Tiap<sup>2</sup> orang revolusioner dan progresif di Indonesia jang mau bekerdja baik untuk kemenangan revolusi tanahairnja diwadajibkan menguasai isi “*Djalan Baru*”. Untuk mengerti PKI dan mengerti Revolusi Indonesia, hingga sekarang hanja “*Djalan Baru*” satu-satunja jang bisa rnenberi pendjelasan; isinja padat dan menggambarkan strategi jang djitu dan taktik<sup>2</sup> jang tepat dalam tingkat perdjjuangan nasional sekarang. Memang, diakui bahwa ada perkataan<sup>2</sup> dan kalimat<sup>2</sup> jang rnasih perlu dirubah (misalnja perkataan RIS supaja dibatja RI). Perlunja ada perubahan<sup>2</sup> dalam bahasa ini, perubahan mana samasekali tidak mengubah isinja, adalah tidak mengurangi sedikitpun pentingnja “*Djalan Baru*”, sebagai pedoman untuk pekerdjaan<sup>2</sup> politik dan organisasi se-hari<sup>2</sup>.

“*Djalan Baru*” adalah dasar dari fikiran Kawan Musso, seorang zeni revolusioner bangsa Indonesia, seorang Kawan jang djudjur, ichlas, tadjam dan berani. Musso mempunia tjaranja sendiri dalam melawan imperialisme dan melawan Musuh<sup>2</sup> Rakjat, jaitu tjara jang keras, tjara jang tidak kenal ampun atau tjara Musso. “*Djalan Baru*” menggambarkan pada kita apa jang dinamakan tjara Musso itu. Setjara singkat: “*Djalan Baru*” adalah perdjjuangan jang tidak mengenal ampun terhadap oportuniste “Kiri” dan Kanan didalam dan diluar partai.

Djakarta, 23 Mei 1951. *Redaksi "Bintang Merah"*

## Keterangan Penerbit pada tjetakan ke-VI

Sebagaimana diterangkan dalam Kata Pengantar dari Red. "Bintang Merah", "*Djalan Baru*" ini telah banjak sekali disiarkan dengan berbagai djalan. Sekalipun demikian, sekarang masih sangat banjak kami terima permintaan akan "*Djalan Baru*" ini. Karena persediaan dari tjetakan ke-V yang diterbitkan oleh "Bintang Merah" telah habis terdjual, maka kami lakukan tjetakan jang ke-VI ini.

*Penerbit*

Djakarta, Djuli 1952.

## Keterangan Penerbit pada tjetakan ke-VII

Tjetakan jang ke-VII dari "*Djalan Baru*" ini sebenarnja sudah hendak dilakukan satu—dua bulan jang lalu karena banjaknja Permintaan, sedangkan tietakan jang ke-VI sudah lama habis. Tetapi atas permintaan CC PKI, Pentjetakan kembali jang ke-VII ini telah ditunda, karena akan ada kemungkinan perubahan<sup>2</sup>.

Demikianlah dalam tjetakan ke-VII ini telah diadakan perubahan<sup>2</sup> oleh CC PKI atas dasar putusan Sidang Plenonja pada bulan Oktober 1953.

*Penerbit*

Djakarta, 5 Oktober 1953.

Rapat Polit-Biro CC PKI pada tgl 13-14 Agustus 1948 di Djokjakarta, setelah mendengar uraian Kawan Musso tentang pekerjaan dan kesalahan Partai dalam dasar<sup>2</sup> organisasi dan politik serta setelah mengadakan diskusi se-dalam<sup>2</sup>nja memutuskan, mengambil resolusi sebagai berikut:

## Lapangan organisasi

Untuk dapat memahami kesalahan<sup>2</sup> PKI dilapangan organisasi, sebaiknya diuraikan lebih dahulu sedikit riwayat PKI.

Dalam tahun 1935 PKI dibangun kembali setjara illegal atas inisiatif Kawan Musso. Selandjutnja PKI illegal inilah jang memimpin perjuangan anti-fasis selama pendudukan Djepang. *Kesalahan pokok dilapangan organisasi jang dibuat oleh PKI illegal jalah, tidak dimengertinja perubahan<sup>2</sup> keadaan politik didalamnegeri sesudah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.* Sebenarnya pada saat itulah, PKI harus melepaskan bentuknja jang illegal dan muntjul dalam masyarakat Indonesia Merdeka dengan terang<sup>2</sup>an.

Akan tetapi karena pada saat itu dan seterusnya bentuk jang illegal ini masih dipegang teguh, maka dengan demikian PKI telah mendorong orang<sup>2</sup> jang menghendaki adanja PKI, untuk mendirikan PKI legal, dan telah memberi kesempatan kepada anasir<sup>2</sup> avonturir jang berhaluan Trotskis untuk mendirikan PBI. Dengan berdirinja PKI legal dan PBI ini, maka timbullah keharusan bagi PKI illegal untuk merebut se-lekas<sup>2</sup>nja pimpinan atas Partai<sup>2</sup> ini, supaja perjuangan klas buruh djangan sampai menjimpang dari rel revolusioner. Dengan sendirinja keharusan ini mengakibatkan terbagi-baginja kader illegal kita, jang sudah tentu melemahkan organisasi.

Oleh sebagian kawan<sup>2</sup> dari PKI illegal, didirikan Partai Sosialis Indonesia, jang, kemudian membuat kesalahan besar karena mengadakan fusi dengan Partai Rakjat Sosialis dari Sutan Sjahrir dan mendjeIma mendjadi Partai Sosialis. Dengan adanja fusi ini, maka terbukalah djalan bagi Sutan Sjahrir dan kawan<sup>2</sup>nja untuk memperkuda Partai Sosialis. Kedjadian ini dmungkinkan oleh kurang sadar dan kurang waspadanja kawan<sup>2</sup> dari PKI illegal jang turut mengemudikan Partai Sosialis.

Kemudian tidak sedikit djum]ah kader<sup>2</sup> illegal kita jang diperlukan baik didalam Pemerintahan maupun didalarn Badan Pekerdja KNIP. Sehingga dengan sendirinja tidak mungkin lagi bagi kawan<sup>2</sup>

ini mentjurahkan segenap tenaganja kepada pekerdjaan dalam ketiga Partai tsb. diatas (PKI legal, PBI, Partai Sosialis). Hal ini lebih melemahkan organisasi.

Berhubung dengan semua ini, maka kedudukan dan rol Partai Komunis Indonesia sebagai Partai klas buruh dan pelopor revolusi telah diperketjil. PKI ditempatkan pada tempat jang tidak semestinja, sehingga sebagai Partai dan organisasi samasekali tidak mewudjudkan kekuatan jang berarti. Dengan demikian sangat berkuranglah tradisi baik dan popularitet PKI dalam waktu sebelum dan selama perang dunia ke-II. Kesalahan besar dalam lapangan organisasi ini diperbesar lagi, karena kaum Komunis sangat mengetjilkan kekuatan klas buruh dan Rakjat seluruhnja dan karena kaum Komunis terpengaruh oleh propaganda dan antjaman Amerika. Oleh sebab itu telah mendjadi takut dan kurang pertjaja kepada kekuatan tenaga anti-imperialis jang dipelopori oleh Soviet Uni. Dengan demikian PKI membesar-besarkan kekuatan imperialisme umumnja dan imperialisme Amerika chusurnja. Dengan demikian pula PKI memberikan terlampau banyak konsesi kepada imperialisme dan klas burdjuis.

Adanja tiga Partai klas buruh sampai sekarang (PKI legal, PBI dan Partai Sosialis), jang semuanya dipimpin oleh Partai Komunis illegal, mengakui dasar<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme dan sekarang tergabung dalam Front Demokrasi Rakjat serta mendjalankan aksi bersama berdasarkan program bersama, telah mengakibatkan ruwetnja gerakan buruh seumumnja. Hal ini sangat menghalangi kemandjuan dan perkembangan kekuatan organisasi klas buruh, djuga sangat menghalangi meluas dan mendalamnja ideologi Marxisme-Leninisme jang konsekwen. Dengan demikian telah memberi banyak kesempatan kepada musuh klas buruh untuk menghalangi kemandjuan gerakan Komunis dengan djalan mendirikan bermatjam<sup>2</sup> Partai Kiri jang palsu dan jang memakai sembojan<sup>2</sup> jang semestinja mendjadi sembojan PKI (diantaranja : “Perundingan atas dasar Kemerdekaan 100%”).

Oleh karena sikap jang anti-Leninis dalam hal politik organisasi ini, maka dilapangan serikatburuhpun kaum Komunis dengan demikian telah sangat menghalangi tumbuhnja keinsafan politik kaum buruh seumumnja sebagai pemimpin Revolusi Nasional. Kaum Komunis jang memimpin gerakan buruh (serikatburuh)

lupa, bahwa menurut Lenin serikatburuh itu adalah sekolahan untuk Komunisme. Melalaikan propaganda Komunisme dikalangan kaum buruh, berarti dengan langsung menghalangi bertambah sedarnja kaum buruh sebagai pemimpin Revolusi Nasional jang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. Berarti melupakan arti gerakan kaum buruh sebagai sumber jang terpenting bagi PKI untuk mendapat kader<sup>2</sup>nja.

Pengaruh daripada kesalahan dalam lapangan organisasi jang telah dilakukan oleh kaum Komunis dengan djelas dan terang nampak djuga dikalangan perdjjuangan tani, dimana pengaruh PKI djuga sangat lemah. Padahal kaum tani amat besar artinja sebagai sekutu kaum buruh dalam Revolusi Nasional. Dengan tidak adanja bantuan jang aktif dari kaum tani, Revolusi Nasional tentu akan kalah.

Dari sudut organisasi kaum Komunis mempunjai pengaruh jang tidak ketjil dikalangan pemuda, terutama dalam Pesindo, Akan tetapi karena gerakan ini tidak langsung terkenal sebagai massa organisasi PKI, sedangkan PKI sebagai Partai tidak terang<sup>2</sup>an memeloporinja, maka ideologi Komunisme dikalangan pemuda terbukti kurang terang dan ruwet, sehingga pendirian pemuda ragu<sup>2</sup>. Akibat jang langsung dari politik organisasi sematjam ini jalah, terhalangnja kemandjuaan perkembangan propaganda Komunisme dikalangan pemuda.

Pun dikalangan wanita, kaum Komunis tidak mempunjai pengaruh jang agak penting. Terang bahwa kaum Komunis mengetjilkan rol kaum wanita dalam Revolusi sekarang.

Dikalangan pradjurit, kaum Komunis mempunjai pengaruh jang agak penting djuga. Akan tetapi karena adanja tiga Partai kaum buruh, maka kaum proletar dan kaum tani jang bersendjata ini dalam prakteknja tidak bersikap terang terhadap PKI dan dengan demikian simpati golongan pradjurit pada Komunisme tidak dapat diperluas. Dilapangan organisasi, PKI tidak mempunjai akar jang kuat dan dalam dikalangan pradjurit.

Semua keruwetan dalam lapangan organisasi djuga menjebabkan tidak kuatnja PKI dalam gerakan sosial dan kebudajaan seperti sport, kesenian dll.nja, baik dalam lapangan organisasi maupun

dalam lapangan ideologi.

Berhubung dengan kesalahan<sup>2</sup> jang mengenai azas dalam lapangan organisasi seperti tsb. diatas dan menarik peladjaran dengan sebaik<sup>2</sup>nja dari kedjadian di Jugoslavia, maka rapat Polit-Biro PKI memutuskan *untuk mengadakan perubahan jang radikal*, jang bertudjuan supaja:

1. Selekas-lekasnja mengembalikan kedudukan PKI sebagai pelopor klas buruh.
2. Selekas-lekasnja mengembalikan tradisi PKI jang baik pada waktu sebelum dan selama perang dunia ke-II.
3. PKI mendapat HEGEMONI (kekuasaan jang terbesar) dalam pimpinan Revolusi Nasional ini.

Dalam pekerdjaan jang maha sukar ini, Polit-Biro jakin, bahwa PKI akan dapat melakukan perubahan radikal tersebut diatas dengan tjepat. Waktu achir<sup>2</sup> ini, kalangan kaum Komunis sendiri, oleh karena pekerdjaan sehari<sup>2</sup> dikalangan Rakjat lebih diperhatikan dan bertambah terasanja keruwetan dan kekatjauan, telah mulai mentjari djalan untuk keluar dari djurang reformisme dengan mengadakan kritik dan self-kritik, terutama didalam rapat pleno CC PKI tgl. 10-11 Djuni 1948 dan dalam rapat Polit-Biro tgl. 2 Djuli 1948. Akan tetapi oleh karena kritik dan self-kritik ini belum benar<sup>2</sup> merdeka dan bersifat bolsjewik, maka rapat tsb. belum dapat mengetahui kesalahan<sup>2</sup> jang benar<sup>2</sup> mengenai strategi dalam lapangan organisasi maupun politik. Akan tetapi selama pertukaran fikiran dengan Kawan Musso dalam rapat Polit-Biro kritik dan self-kritik didjalankan dengan leluasa. Semua anggota Polit-Biro seia-sekata mengakui kesalahan<sup>2</sup>nja dengan terus-terang dan sanggup akan memperbaiki selekas-lekasnja.

Djalan satu<sup>2</sup>nja untuk melikwidasi kesalahan pokok itu dengan tjara radikal jalah mengadakan hanja SATU Partai jang LEGAL daripada klas buruh. Ini berarti dihapuskanja pimpinan PKI jang illegal. Seperti tsb. diatas, PKI jang dibangun kembali oleh Kawan Musso setjara illegal pada tahun 1935 itu melandjutkan perjuangannja pada waktu pendjadjahan Djepang sampai zaman Republik, dan hingga waktu ini masih memimpin gerakan anti-imperialis.

PKI illegal ini hingga sekarang didjadikan sasaran oleh kaum



Trotskyis yang langsung atau tidak langsung tergabung dalam Partai, dengan maksud untuk mengatjaukan gerakan Rakyat dengan mengatakan, bahwa PKI itu adalah PKI yang diperkuda oleh Belanda atau "PKI Van der Plas", artinya PKI yang didirikan untuk kepentingan Belanda. Tuduhan ini lebih<sup>2</sup> lagi menundjukkan ketjurangan golongan Trotskyis untuk membusukkan PKI illegal, yang benar dibangunkan kembali oleh Kawan Musso dengan kawan<sup>2</sup> yang lain, diantaranya kawan<sup>2</sup> almarhum Pamudji, Sukajat, Abdul Aziz, Abdul Rachim dan kawan<sup>2</sup> Djokosudjono, Achmad Sumadi, Ruskak, Marsaid, kemudian diteruskan oleh kawan<sup>2</sup> Amir Sjarifuddin, Wikana, Sudisman, Sardjono, Subijanto almarhum, Sutrisno, Aidit dll.

Semua kesalahan<sup>2</sup> dilapangan politik organisasi yang tsb. diatas, pada pokoknya jalah mengetjilkan rol Partai Komunis Indonesia sebagai satu<sup>2</sup>nja kekuatan yang seharusnya memegang pimpinan daripada klas buruh dalam mendjalankan revolusi. Berdasarkan itu, maka rapat Polit-Biro PKI telah memutuskan, bahwa seterusnya harus hanya ada satu Partai yang berdasarkan Marxisme-Leninisme dalam kalangan kaum Buruh. Polit-Biro PKI memutuskan mengadjukan usul, supaya diantara tiga Partai yang mengakui dasar<sup>2</sup> Marxisme-Leninisme yang sekarang telah tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat serta telah mendjalankan aksi bersama, berdasarkan program bersama, selekas-lekasnja diadakan fusi (peleburan), sehingga mendjadi SATU Partai klas buruh dengan memakai nama yang bersedjarah, jaitu Partai Komunis Indonesia, disingkat PKI. Hanya Partai sedemikian itulah yang akan dapat memegang rol sebagai pelopor dalam gerakan Kemerdekaan sekarang ini.

Revolusi kita adalah Revolusi Nasional atau Revolusi Demokrasi Burdjuis dalam zaman imperialisme dan Revolusi Proletar dunia. Menurut kodratnja dan dipandang dari sudut sedjarah maka hanya klas buruhlah, sebagai *klas yang paling revolusioner dan konsekwen anti-imperialisme, yang semestinja memimpin revolusi ini, dan bukan klas lain.*

Adapun tjara mewudjudkan fusi ini dengan selekas-lekasnja bendaknja sbb.:

1. Membersihkan PKI dari anasir<sup>2</sup> yang tidak baik.

2. Membentuk Komite Fusi yang berkewajiban:
  - a. Mendaftar anggota<sup>2</sup> PBI dan Partai Sosialis yang dapat diusulkan dengan segera menjadi anggota PKI.
  - b. Menjiapkan masuknya anggota<sup>2</sup> lainnya yang masih kurang maju dengan memberi kepada mereka, kewajiban untuk mempelajari buku-buku Marxisme-Leninisme, kursus<sup>2</sup>, pekerjaan yang tertentu dsb.
3. Setelah semua ini selesai, lalu mengadakan Kongres Fusi daripada ketiga Partai, dimana ketiga Partai dilebur menjadi satu dengan menlakai nama Partai Komunis Indonesia dan dipilih Central Komite yang baru setjara demokratis.

Dengan adanya hanya satu Partai kelas buruh yaitu PKI, maka pekerjaan akan menjadi lebih sederhana dan rasional.

Adanya satu PKI yang legal, memudahkan dan menegaskan pekerjaan tiap<sup>2</sup> Komunis dalam serikat buruh, dalam perjuangan tani, pemuda, wanita, dalam gerakan sosial dll.

Oleh karena PKI adalah Partai kelas yang miskin dan yang tertindas, seharusnya susunan pimpinan dan susunan Partai seluruhnya sebagian besar terdiri dari elemen<sup>2</sup> proletar sedangkan kaum intelektual seharusnya menjadi Pembantu yang tidak dapat diabaikan dalam semua hal terutama dalam pekerjaan pembentukan kader<sup>2</sup> dan dalam mempertinggi tingkatan teori anggota PKI. Kesalahan<sup>2</sup> pokok hingga sekarang, disebabkan pula oleh karena kurangnya elemen-elemen proletar dalam pimpinan Partai.

Rapat Polit-Biro memperkuat putusan CC PKI untuk membentuk suatu organisasi-massa baru, ialah : "*Lembaga Persahabatan Indonesia-Soviet Uni*". Ini perlu sekali, oleh karena di Indonesia terdapat sangat banyak orang yang bersimpati kepada Soviet Uni dan yang masih segan memasuki PKI. Perlu sekali adanya lembaga itu, supaya Rakyat jelata mengetahui lebih banyak tentang Soviet Uni, supaya Rakyat jelata mempunyai kepertajaan lebih besar kepada gerakan demokrasi Rakyat yang dipimpin oleh Soviet Uni. Kekuatan Soviet Uni dan kekuatan<sup>2</sup> anti-imperialis lainnya diseluruh dunia sebenarnya adalah jauh lebih besar daripada kekuatan blok imperialisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat, yang juga bemiati menjadiah kembali tanahair kita.

## II

# Lapangan politik

### *Politik luarnegeri*

Dalam lapangan politik luarnegeri, rapat Polit-Biro berpendapat, bahwa kesalahan<sup>2</sup> besar jang telah dibuat oleh kaum Komunis Indonesia selama tiga tahun ini tidak bersifat kebetulan, melainkan mempunjai akar jang berasal semendjak meletusnja perang dunia II dan pendudukan tanahair kita oleh Djepang dan jang selandjutnja dipengaruhi oleh pendirian jang salah dari partai<sup>2</sup> sekawan, jaitu Partai-partai Komunis Eropa Barat (Perantjis, Inggris dan Belanda).

Pendirian politik jang salah dari Partai<sup>2</sup> Komunis di Eropa Barat ini pada umumnja, jalah karena tidak dimengertinja perubahan<sup>2</sup> jang besar dilapangan politik internasional dan perubahan<sup>2</sup> keadaan dinegerinja masing<sup>2</sup> sesudah perang dunia II berachir dengan hantjumja negeri<sup>2</sup> fasis Djerman, Italia dan Djepang. Semendjak perang dunia II meletus, maka gerakan kaum buruh revolusioner di-negeri<sup>2</sup> kapitalis, untuk sementara waktu, harus melakukan politik bekerdja-sama dengan semua tenaga-anti-fasis dinegerinja masing<sup>2</sup> termasuk pemerintah Amerika, Inggris, Perantjis, Belanda dsb. Pun djuga gerakan revolusioner dari Rakjat di-negeri<sup>2</sup> djadjahan, untuk sementara harus melakukan politik sematjam itu.

Setelah Soviet Uni terlibat dalam perang dunia II karena serangan fasis Djerman, maka bagi Soviet Uni djuga timbul keharusan untuk erat bekerdja bersama dengan negara<sup>2</sup> besar jang bersekutu melawan negeri<sup>2</sup> fasis.

Semuanja bermaksud memperhebat perlawanan terhadap penjerang<sup>2</sup> fasis, musuh jang paling berbahaja pada waktu itu, bukan sadja bagi negeri<sup>2</sup> kapitalis dan imperialis, tetapi djuga bagi Soviet Uni, bagi gerakan buruh revolusioner di-negeri<sup>2</sup> kapitalis dan imperialis dan bagi gerakan revolusioner dari Rakjat dinegeri djadjahan. Setelah perang dunia II berachir dengan hantjurnja ketiga negeri fasis tadi, maka bagi Partai<sup>2</sup> Komunis dinegeri<sup>2</sup>

kapitalis dan imperialis dan bagi perjuangan revolusioner di-negeri<sup>2</sup> djadjahan sudah tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan kerdjasama dengan pemerintahnja masing<sup>2</sup>. Apalagi sesudah ternjata, bahwa kaum burdjuis sudah mulai menggunakan tjara-tjara untuk menindas gerakan kemerdekaan dinegeri djadjahannja.

Kesalahan dari Partai<sup>2</sup> Komunis Perantjis dan Inggris dan djuga Partai Komunis Belanda jang terpengaruh oleh Partai Komunis Perantjis, jalah karena tidak dimengertinja perubahan besar jang telah berlaku dalam lapangan politik internasional sesudah perang dunia, terutama jang mengenai perjuangan kemerdekaan dari Rakjat di-negeri<sup>2</sup> djadjahan.

Pada saat perang dunia II berachir dengan hantjurnja negeri<sup>2</sup> fasis, maka perjuangan kemerdekaan di-negeri<sup>2</sup> djadjahan harus dikobar-kobarkan lagi dengan sehebat-hebatnja dan Partai<sup>2</sup> Komunis di-negeri<sup>2</sup> pendjadjah harus menjokong se-kuat<sup>2</sup>nja. Kerdjasama dalam perjuangan kemerdekaan Rakjat jang didjadjah dengan negeri<sup>2</sup> imperialis sudah tidak lagi pada tempatnja!

Akan tetapi, karena tidak faham tentang perubahan keadaan politik ini, maka CPN (Partai Komunis Belanda) beranggapan, bahwa perjuangan Rakjat Indonesia tidak boleh keluar dari batas dominion status dan oleh karenanja sembojan jang paling baik untuk Indonesia menurut pendirian mereka jalah: “Uni-verband”, atau dengan perkataan lain : tetap tinggal dalam lingkungan “Commonwealth” Belanda. Djadi Rakjat Indonesia harus terus-menerus “kerjasama” dengan imperialisme Belanda. Demikian pula pendirian Partai Komunis Perantjis terhadap perjuangan kemerdekaan Vietnam.

Hal jang tidak boleh dilupakan jalah, bahwa di Indonesia selama pendudukan Djepang sudah ada Komunis<sup>2</sup> palsu dan komunis<sup>2</sup>—*renegat* (penghianat), jang suka mendjalankan kerdjasama dilapangan politik dengan fasis Djepang.

Politik jang reformis dari Partai<sup>2</sup> Komunis di-negeri<sup>2</sup> Eropa Barat, disebabkan karena tidak fahamnja akan perubahan<sup>2</sup> keadaan internasional jang penting sesudah perang dunia II berachir. Oleh kawan<sup>2</sup> bekas anggota CPN jang tiba di Indonesia, dengan otomatis dengan tidak dipikirkan dalam-dalam, djuga dengan tidak

ditjotjokkan dengan keadaan objektif (proklamasi kemerdekaan tanggal 17-8 tahun 1945), politik reformis ini telah dipraktekkan, sehingga akibatnja sangat membahayakan kemandjuaan Revolusi Nasional kita.

Perlu ditegaskan, bahwa politik reformis jang berasal dari luarnegeri ini djustru memberi kesempatan berkembangnja aliran reformis jang menguasai politik luarnegeri Republik dan jang dipimpin oleh kaum sosialis kanan (Sutan Sjahrir). Politik reformis ini dapat dinjatakan dengan dua hal:

1. Mentjari keuntungan dan bantuan dengan kerdjasama, bukan dengan golongan anti-imperialis melainkan dengan golongan imperialis. Jaitu dengan rnenggunakan pertentangan<sup>2</sup> diantara imperialisme Inggris dan Amerika dan diantara imperialisme Inggris dan imperialisme Belanda. Pada permulaannja imperialisme Inggrislah jang diadjaknja bermain-mata. Dasar daripada politik reformis ini diletakkan dalam Manifes Politik Pemerintah Republik November 1945.
2. Menghadapi imperialisme Belanda tidak dengan perdjjuangan jang konsekwen revolusioner dan anti-imperialis, melainkan dengan politik reaksioner atau politik kompromis jang bersembojan: “bukan kemenangan militer jang dimaksudkan, melainkan kemenangan politik”. Djadi bukannya perdjjuangan dengan sendjata jang diutamakan, melainkan perdjjuangan politik, sedangkan, imperialisme Belanda terus-menerus berusaha memperkuat tenaga militernja.

Kaum Komunis jang membiarkan berkembangnja dan meradjalelanja politik reaksioner ini, malahan turut serta menjokongnja, telah membuat dua matjam kesalahan:

- a. Lupa akan peladjaran teori revolusioner kita, bahwa Revolusi Nasional anti-imperialis dizaman sekarang ini sudah mendjadi bagian daripada Revolusi Proletar dunia. Kesimpulan daripada peladjaran ini jalah, bahwa Revolusi Nasional di Indonesia harus berhubungan erat dengan tenaga<sup>2</sup> anti-imperialis lainnja didunia, jaitu perdjjuangan revolusioner diseluruh dunia, baik di-negeri<sup>2</sup> djadjahan atau negeri setengahdjadjahan, maupun di-negeri<sup>2</sup>

kapitalis-imperialis. Sebab semua ini adalah sekutu daripada Revolusi Nasional kita. Negeri Soviet Uni sebagai tenaga anti-imperialis jang terbesar dan terkuat harus dipandang sebagai pangkalan, sebagai benteng jang terkuat, atau sebagai pemimpin dan pelopor daripada semua perjuangangan anti-imperialis diseluruh dunia. Sebab hanja ada dua golongan didunia jang berhadapan dan berlawanan satu sama lainnja, jaitu golongan imperialis dan golongan anti-imperialis. Bagi Revolusi Nasional Indonesia, *tidak ada tempat lain selainnja difihak golongan anti-imperialis!* Hanja dari fihak golongan anti-imperialis sebagai sekutu jang sedjati, Revolusi Nasional Indonesia dapat memperoleh keuntungan dan bantuan jang diperlukan, dan bukan dari fihak golongan imperialis.

- b. Kesalahan jang kedua ialah, bahwa tidak tjukup dimengerti perimbangan kekuatan antara Soviet Uni dan imperialisme Inggris-USA, setelah Soviet Uni berhasil dengan sangat tjepatnja menduduki seluruh Tung Pai (Mansjuria). Pada waktu itu sudah ternjata kedudukan Soviet Uni jang sangat kuat dibenua Asia, jang mengikat banjak tenaga militer daripada imperialisme USA, Inggris dan Australia dan dengan demikian memberi kesempatan baik bagi Rakjat Indonesia untuk memulai revolusinja. Pada saat itu kaum Komunis Indonesia sudah membesar-besarkan kekuatan Belanda dan imperialisme lainnja dan mengetjilkan kekuatan Revolusi Indonesia serta golongan anti-imperialis lainnja.

Konsekwensi jang sudah semestinja dari politik kaum sosialis kanan (Sutan Sjahrir) jang reaksioner itu, ialah penanda-tanganan truce agreement 1946 dan selandjutnja penanda-tanganan persetujuan Linggadjati jang memungkinkan imperialisme Belanda menjiapkan perang kolonial, jang meletus pada tanggal 21 Djuli 1947.

Akibat kesalahan pokok dalam lapangan politik tidak habis disitu sadja; konsekwensi jang lebih menjelakakan lagi ialah tidak lain daripada penanda-tanganan persetujuan Renville. Persetujuan Renville ini adalah puntjak akibat kesalahan<sup>2</sup> jang reaksioner, jang telah membawa Republik pada tepi djurang kolonialisme.

Tanggung-djawab jang berat ini terletak dipundak kaum Komunis.

Kesalahan selandjutnja jang besar pula jalah bahwa kabinet Amir Sjarifuddin mengundurkan diri dengan sukarela dan dengan tidak ada perlawanan samasekali. Kaum Komunis pada waktu itu tidak ingat akan peladjaran Lenin: "Soal pokok daripada tiap revolusi adalah soal kekuasaan negara". Dengan bubarnja kabinet Amir Sjarifuddin terbukalah djalan bagi elemen<sup>2</sup> burdjuis komprador untuk memegang pimpinan pemerintahan dan dengan demikian djuga pimpinan Revolusi Nasional kita, sedangkan kaum Komunis mengisolasi dirinja dalam oposisi. Dapat dlkatakan, bahwa saat itulah Revolusi Nasional kita benar<sup>2</sup> berada dalam bahaya, jang makin lama makin mendjadi besar. Sedjak saat itulah Revolusi Nasional kita makin lama makin djelas merosot kedalam djurang kapitulasi (penjerahan) kepada imperialisme Belanda cs, akibat politik kompromis jang sangat reaksioner daripada elemen<sup>2</sup> burdjuis Indonesia jang memegang pimpinan pemerintahan.

Politik kompromis jang reaksioner ini makin menguntungkan imperialisme Belanda dan makin membesarkan bahaya bagi Republik kita.

Sesudah kaum Komunis tidak lagi duduk didalam pemerintahan dan setelah mereka, mulai giat bekerdja dikalangan Rakjat djelata, maka mereka mulai sadar akan kesalahan<sup>2</sup> dan kekurangan-kekurangannja, diantara lain kelemahan<sup>2</sup> organisasi Partai serta organisasi massa, terutama dikalangan kaum buruh dan tani. Mereka mulai insaf, bahwa terutama harus diusahakan penjelesaian soal agraria dengan se-lekas<sup>2</sup>nja, jang dahulunjua sangat kurang mendapat perhatian mereka, padahal masalah tani adalah masaalah jang penting bagi Revolusi Nasional Indonesia.

Djuga mulai diinsafi, bahwa dengan tidak adanja sokongan, terutama dari Rakjat pekerdja (buruh, tani-pekerdja dan pekerdja lainnja) *jang berorganisasi* rapi, tidaklah mungkin mewujudkan hegemoni klas buruh dalam Revolusi National kita ini, dan tidak mungkin pula membentuk suatu pemerintahan kerakjatan jang kuat dan stabil (jang berdiri tegak). Oleh karenanja kaum Komunis berdaja-upaja dengan segiat-giatnja mengorganisasi massa Rakjat pekerdja, agar dalam waktu jang pendek dapat menjusun massa-organisasi jang rapi dalam berbagai kalangan Rakjat pekerdja, jang

berkewajiban mendjalankan rol sebagai tulang-punggung Revolusi Nasional kita.

Ternjata bahwa didalam 6 bulan jang belakangan ini, sedjak pimpinan negara dipegang oleh elemen<sup>2</sup> burdjuis komprador, tumbuhnja politik jang reaksioner berdjalan dengan tjepatnja. Malahan pada beberapa bulan jang belakangan sudah tampak tanda<sup>2</sup>, bahwa politik pemerintah jang reaksioner itu akan tumbuh ketinggian kontra-revolusioner.

Hal ini sebagian disebabkan, karena agitasi dan propaganda dari fihak kaum Komunis untuk menjedarkan massa Rakjat pekerdja tentang kekeliruan<sup>2</sup> politik pemerintah, disana-sini telah didjalankan dengan tjara jang kurang bidjaksana, hingga menjinggung perasaan. Akan tetapi sebagian lagi disebabkan, karena tindakan<sup>2</sup> jang reaksioner dari fihak pemerintah terhadap hak<sup>2</sup> demokrasi Rakjat pekerdja, sedangkan Rakjat pekerdja sudah makin sadar akan *rol dan kewajibannja serta hak<sup>2</sup>nja* dalam Revolusi Nasional. Tindakan<sup>2</sup> reaksioner jang telah njata diantaranja ialah :

- a. Penghapusan hak<sup>2</sup> demokrasi jang pokok misalnja hak berdemonstrasi, walaupun buat sementara.
- b. Niat untuk mengekang hak mogok bagi kaum buruh, dengan tidak mengindahkan samasekali faktor<sup>2</sup> jang njata, jaitu jang memaksa kaum buruh menggunakan sendjata perjuangannja jang paling tadjam itu untuk membela nasibnja dan membela Revolusi Nasional.
- c. Politik dalam lapangan dkonomi jang terang-terangan reaksioner, jang menentang dan memperkosa UUD Republik kita fasal 33 dan jang sangat merugikan penghidupan Rakjat pekerdja, serta kedudukan negara dan Revolusi Nasional kita. Ini semua hanja mengunfungkan beberapa orang burdjuis komprador jang dengan terang<sup>2</sup>an menundjukkan sikap anti-nasional,
- d. Politik dilapangan agraria jang reaksioner dan antjaman terhadap kaum tani jang sudah sadar akan rol dan kewajibannja sebagai tenaga jang penting dalam pelaksanaan Revolusi Nasional dan karenanja telah bergerak menghilangkan segala sisa feodalisme dilapangan agraria.
- e. Perintah untuk mendaftarkan nama<sup>2</sup> dan mengamati



tindakan<sup>2</sup> pemimpin<sup>2</sup> Rakjat pekerdja.

Teranglah, bahwa tindakan pemerintah jang reaksioner itu, jang bermaksud mempertahankan kedudukannya dan menguntungkan beberapa kelompok kaum burdjuis, tidak boleh tidak tentu makin meruntjingkan pertentangan antara Rakjat pekerdja dan pemerintah. Djadi bukannya kaum buruh jang meruntjingkan pertentangan klas, melainkan kaum burdjuis sendiri.

Sudah mendjadi kewadajiban kaum Komunis untuk menjedarkan Rakjat pekerdja dan kaum progresif terhadap berkembangnja politik reaksioner jang berbahaja dari pemerintah jang achimja pasti akan mendjerumuskan Revolusi Nasional kita kedjurang kegagalan dan kemusnahan. Dengan demikian dimaksudkan supaja tenaga massa Rakjat pekerdja bersama dengan tenaga progresif lainnja dapat merubah haluan politik pemerintah jang tidak sehat dan berbahaja itu kearah djurusan jang sehat.

Walaupun kaum Komunis sekarang telah mendapat pengaruh lebih besar daripada diwaktu sebelum meninggalkan pemerintah, akan tetapi oleh karena tidak tahu tentang kesalahannya jang pokok dalam lapangan politik, maka sikap sebagian besar daripada Rakjat terhadap Komunisme djuga masih belum tjukup terang dan tegas.

Berhubung dengan itu, rapat Polit-Biro menetapkan, bahwa PKI dalam susunan jang baru dengan tegas harus membatalkan persetudjuan Linggadjadi dan Renville, jang dalam prakteknja telah mendjadi sumber daripada bermatjam-matjam keruwetan diantara pemimpin<sup>2</sup> dan Rakjat djelata. Hapusnja persetudjuan Linggadjadi dan Renville berarti bahwa Republik Indonesia merdeka sepenuhnya dan Rakjat tidak terikat lagi oleh persetudjuan<sup>2</sup> jang mengikat dan memperbudak. Dengan demikian Rakjat didaerah pendudukan akan mendapat kemerdekaan luas untuk beraksi terhadap Belanda. Hapusnja persetudjuan Linggadjadi dan Renville berarti djuga, bahwa orang Indonesia boleh menganggap adanya kekuasaan Belanda di Indonesia sebagai pelanggaran kedaulatan Republik jang merdeka, dan oleh karena itu tentara Belanda harus diusir se-lekas<sup>2</sup>nja. Hapusnja persetudjuan Linggadjadi dan Renville menghilangkan segala kebimbangan dikalangan beberapa partai lain untuk memperluas dan meneguhkan hubungan Republik dengan negeri<sup>2</sup> asing. Dengan demikian Republik djuga mendapat

kesempatan untuk menerobos blokade Belanda jang mengisolasi Republik dari negeri<sup>2</sup> luar dalam lapangan ekonomi dan politik.

Kaum Komunis menolak persetujuan Linggadjadi dan Renville, bukannya karena Belanda terbukti tidak setia dan telah mengindjak-indjak persetujuan itu. Tidak! Sekali-kali tidak! Komunis *prinsipil* menolak persetujuan Linggadjadi dan Renville, oleh karena persetujuan-persetujuan itu djikalau dipraktekkan, akan mewujudkan negara jang pada hakekatnja sama sadja dengan djadjahan, jang berbeda dengan India, Birma, Filipina dan djadjahan lain<sup>2</sup> hanjalah kulitnja sadja. Sebab itu PKI tetap bersembojan: “Merdeka se-penuh<sup>2</sup>nja”.

Penolakan persetujuan Linggadjadi dan Renville berarti djuga selfkritik jang keras dikalangan PKI. Dan pengakuan salah ini harus dipopulerkan djuga kepada Rakjat-banjak.

PKI menolak perundingan dengan Belanda jang tidak didasarkan atas hak jang sama. Komunis prinsipil tidak menolak perundingan, akan tetapi harus didasarkan atas hak<sup>2</sup> jang sungguh-sungguh sama. Dalam perundingan se-kali<sup>2</sup> tidak boleh disinggung soal kedaulatan Republik atas seluruh Indonesia.

Dalam perundingan<sup>2</sup> ini PKI sanggup memberikan sekedar kondisi dilapangan ekonomi dan kebudajaan kepada orang<sup>2</sup> Belanda jang tidak menentang Revolusi kita, lebih daripada jang sekarang biasa diberikan di-negeri<sup>2</sup> kapitalis.

Dalam politiknya terhadap Soviet Uni PKI mengandjurkan sebulat<sup>2</sup> nja supaja diadakan perhubungan langsung antara Republik Indonesia dengan Soviet Uni dalam segala lapangan. Soviet Uni adalah sekutu jang semestinja dari Rakjat Indonesia jang melawan imperialisme oleh karena Soviet Uni memelopori perjuangan melawan blok imperialis jang dipimpin oleh Amerika Serikat. Tjukup djelas bagi kita bahwa Amerika Serikat membantu dan mempergunakan Belanda untuk mentjekek Republik kita jang demokratis. PKI harus menerangkan kepada Rakjat-banjak, bahwa pengakuan Soviet Uni membawa kebaikan semata-mata, sebab Soviet Uni sebagai negara kaum buruh tidak mungkin bersifat lain daripada anti-imperialis. Dengan demikian Soviet Uni tidak mempunyai kepentingan lain terhadap Indonesia ketjuali

membantu Indonesia dalam perjuangannya yang juga bersifat anti-imperialis.

Dalam perjuangannya melawan imperialisme, PKI harus menghubungkan diri dengan gerakan<sup>2</sup> anti-imperialis di Asia, di Eropa dan di Amerika, terutama sekali dengan Rakjat negeri Belanda yang progresif, yang sebagian besar dari mereka dipimpin oleh CPN. Partai ini walaupun sudah membuat kesalahan<sup>2</sup>, adalah *satu-satunya Partai kelas buruh dinegeri Belanda yang sungguh<sup>2</sup> membantu gerakan keinerdekaan kita pada waktu sebelum dan sesudah peperangan dunia kedua*. CPN adalah juga menjadi sekutu kita yang semestinya, dan perhubungan kita dengan CPN harus lebih dikokohkan lagi. Lain daripada itu PKI harus terus-menerus mendesak CPN supaya benar<sup>2</sup> meninggalkan politik yang bersebojan : “Unie-verband” yang jahat itu dan menggantinya dengan politik “INDONESIA MERDEKA SEPENUH-PENUHNYA”. Tujuan PKI ialah mendirikan Republik Indonesia berdasarkan Demokrasi Rakjat, yang meliputi seluruh daerah Indonesia dan yang bebas dari pengaruh imperialisme serta tentaranya.

### *Politik Dalam negeri*

Soal yang penting ialah, bahwa PKI dengan semua jalan harus menghalangi pemerintah sekarang ini jangan sampai terus-menerus memberi konsesi kepada imperialisme karena ini berarti menjerahkan Republik kedalam tangan imperialisme.

Lagi pula dalam pekerjaannya sehari-hari PKI harus dengan giat membela kepentingan<sup>2</sup> kaum buruh dan kaum tani.

Selanjutnya PKI harus juga berusaha, se-lekas<sup>2</sup>nya melikwidasi segala kelemahan Revolusi kita. Kelemahan itu ialah:

1. Kelas buruh dengan pelopornya, yaitu PKI, belum memegang hegemoni daripada pimpinan Revolusi Nasional kita. Untuk mewujudkan hegemoni ini dengan tegas dan teguh, maka perlu sekali dipenuhi syarat<sup>2</sup> yang penting, yaitu adanya organisasi Partai yang rapi dan kuat yang meliputi tiap<sup>2</sup> pabrik, perusahaan, bengkel, kantor, kampung dan desa, dengan anggota dan kader<sup>2</sup> bagian yang sebagian besar terdiri dari kaum, buruh dan tani-pekerdja. Selanjutnya juga adanya organisasi<sup>2</sup> massa yang kuat

jang meliputi sebagian besar daripada Rakjat pekerdja dari berbagai golongan, terutama dari kalangan kaum buruh dan tani, sedangkan Pimpinannja harus ditangan Partai.

2. Pimpinan Revolusi Nasional kita, walaupun hegemoninja harus ada ditangan klas buruh, harus diwujudkan oleh PKI bersama<sup>2</sup> dengan partai<sup>2</sup> atau elemen<sup>2</sup> lain jang progresif berdasarkan sebuah program nasional jang revolusioner, jang disetujui oleh bagian terbesar daripada Rakjat kita. Dengan demikian dapat terbentuk suatu pimpinan revolusi jang seia-sekata dan jang erat bekerdja bersama dengan dan disokong oleh seluruh Rakjat atau se-tidak<sup>2</sup>nja oleh sebagian terbesar daripadanja. Hingga sekarang hal ini belum tertjapai.
3. Hingga sekarang Revolusi Nasional kita belum melandasi alat<sup>2</sup> kekuasaan negara jang lama, jang djiwa, susunan ataupun tjara bekerdjanja masih sangat berbau pendjadjahan. Dalam hal ini PKI tidak boleh melupakan peladjaran Marx jang mengatakan, bahwa kewadajiban tiap revolusi ialah menghantjurkan alat kekuasaan negara jang lama dan menjusun alat kekuasaan negara jang baru. Dengan demikian dapatlah ditjegah usaha musuh untuk merebut kembali kekuasaan negara. Revolusi kita dengan melalaikan kewadajiban ini teiah membahayakan nasibnja sendiri. Oleh karena itu mendjadi kewadajiban jang penting bagi PKI dan semua tenaga progresif untuk selekas-lekasnja memperbaiki kesalahan jang besar ini. Alat<sup>2</sup> kekuasaan negara jang dengan segera harus dirubah dan disusun kembali ialah:

*a. Pemerintahan dalam negeri*

Hingga sekarang alat ini boleh dibilang masih hampir samasekali alat lama jang bersifat feodal-kolonial, baik dalam susunan maupun dalam tjara bekerdjanja. Pun orang<sup>2</sup>nja sebagian besar adalah orang<sup>2</sup> lama. Harus segera diusahakan agar supaja susunan pemerintahan desa sampai kabupaten dirubah samasekali setjara radikal, berdasarkan pemerintahan kolegial (kedewanan) jang dipilih langsung oleh Rakjat. Jang penting terutama ialah pemerintahan desa, agar Rakjat tani segera dapat dibebaskan dari belenggu<sup>2</sup> feodalisme jang hingga sekarang masih mengikatnja. Perabahan ini harus dilaksaidakan dalam tempo jang se-singkat<sup>2</sup>nja. Dengan sendirinia anasir<sup>2</sup> jang reaksioner dan kontra-revolusioner

harus segera disingkirkan dari kalangan pemerintahan dalam negeri.

*b. Kepolisian negara*

Baik anggota<sup>2</sup> maupun kader<sup>2</sup>nja harus diberi pendidikan yang sesuai dengan arti dan isi Revolusi Nasional kita dan kewajiban kepolisian negara sekarang, ialah membela kepentingan Revolusi Nasional, yang berarti juga membela kepentingan Rakyat pekerja khususnya. Jadi kewajiban mereka sekarang adalah bertentangan samasekali dengan kewajiban mereka dahulu di zaman penjajahan. Terang, bahwa bagi anasir<sup>2</sup> yang reaksioner atau kontra-revolusioner tidak ada tempat lagi didalam kepolisian negara. Kepolisian harus dipimpin oleh kader<sup>2</sup> yang progresif.

*c. Pengadilan negeri*

Tjara bekerdjanja pengadilan negeri. harus tidak lagi setjara lama, yang hingga sekarang masih berlaku, melainkan harus diubah dan didasarkan atas kepentingan Revolusi Nasional kita. Terutama yang mengenai perkara<sup>2</sup> politik. Anasir<sup>2</sup> yang reaksioner dan kontra-revolusioner harus segera disingkirkan dari aparat ini.

*d. Ketentaraan*

Tentara sebagai alat kekuasaan negara yang terpenting harus istimewa mendapat perhatian. Kader<sup>2</sup> dan anggota<sup>2</sup>nja harus diberi pendidikan istimewa yang sesuai dengan kewajiban tentara sebagai aparat terpenting untuk membela Revolusi Nasional kita, yang berarti pula membela kepentingan Rakyat pekerja. Tentara harus bersatu dengan dan disukai oleh Rakyat. Tentara harus dipimpin oleh kader<sup>2</sup> yang progresif. Dengan sendirinja dan terutama dikalangan kader<sup>2</sup>nja harus dibersihkan dari anasir<sup>2</sup> yang reaksioner dan kontra-revolusioner.

e. Alat<sup>2</sup> negara lainnja yang penting<sup>2</sup> seperti djawatan<sup>2</sup> yang mengurus keuangan negara, alat<sup>2</sup> produksi dan distribusi, pada umumnya harus dibersihkan dari anasir<sup>2</sup> yang reaksioner dan kontra-revolusioner, terutama dalam pimpinannya, agar supaya

kepentingan negara dan Rakyat dapat terjamin.

4. Kelalaian memberikan jaminan kepada anggota-anggota ketentaraan dan kepolisian negara khususnya, dan kepada Rakyat pekerja umum (buruh dan pegawai negeri), hingga menyebabkan terlantarnya nasib mereka ini.

PKI harus memperjuangkan se-lekas<sup>2</sup>nja tertjapainja jaminan sekurang-kurangnya keperluan hidup se-hari<sup>2</sup> bagi Rakyat pekerja tersebut diatas.

Selain itu harus diperjuangkan pula segera terlaksananya :

- a. bagi kaum buruh: hak<sup>2</sup> demokrasi disegala lapangan, oleh karena mereka sebagai pelopor revolusi harus terutama diberi keuntungan banyak.
- b. bagi kaum tani: hapusnja sisa<sup>2</sup> peraturan zaman feodal dan peraturan<sup>2</sup> imperialis dilapangan pertanian, jang bagi Rakyat tani merupakan rintangan hebat untuk mendapat perbaikan nasib. Adapun politik PKI untuk kaum tani diseluruh Indonesia ialah: "Tanah untuk kaum tani". Djadi tiap orang tani harus diberi tanah, supaya ia merasakan benar<sup>2</sup> buah revolusi. Akan tetapi kaum Komunis harus ingat, bahwa sekarang dan dalam beberapa tahun jang akan datang belum mungkin melaksanakan sembojan ini, berhubung dengan kurangnya luas tanah di Djawa dan Madura, sedangkan jumlah kaum tani terlampau besar. Oleh karena itu buat sementara waktu, Rakyat tani dapat diberi pertolongan jang lebih baik tidak dengan membagi-bagikan kepada mereka tanah<sup>2</sup> jang dapat dibagikan kepadanya sebagai hasil penghapusan sisa<sup>2</sup> peraturan feodal dilapangan agraria. Tetapi tanah ini diserahkan kepada desa dan desalah jang mengatur penggarapannya oleh buruh-tani dengan tjara jang menguntungkan mereka.
- c. Bagi pekerja intelektual: penghargaan jang lajak oleh pemerintah, sebab banyak pekerja intelektual jang merasa diri dan pekerjaannya samasekali tidak dihargai oleh pemerintah.
  1. Kelalaian dalam memperluas alat<sup>2</sup> produksi jang lama dan membangun alat<sup>2</sup> produksi jang baru jang dikuasai negara serta mengerjakannya dengan se-hebat<sup>2</sup>nja untuk mempertinggi kemakmuran Rakyat.

2. Kelalaian dalam mengadakan aparat distribusi negara jang baik jang dapat memenuhi kewadjabannja dengan beres.
3. Kelalaian dilapangan keuangan negara jang ternjata dengan rnemuntjaknja kesukaran<sup>2</sup> tentang hal uang, jang betul<sup>2</sup> dirasai oleh seluruh masyarakat, terutama dikalangan Rakjat pekerdja.
4. Kelalaian dalam membangun koperasi<sup>2</sup> Rakjat, tentang koperasi dilapangan keradjinan tangan dan perusahaan ketjil, dilapangan kredit dan distribusi jang dapat bekerdja bersama dengan pemerintah, baik dalam usaha pengumpulan bahan<sup>2</sup> makanan, maupun dalam usaha distribusi barang<sup>2</sup> dari pemerintah.
5. Kelalaian dilapangan sosial, jaitu terutama jang mengenai pemberian pertolongan kepada tentara jang berhidjrah, pengungsi, djuga jang mengenai perumahan jang lajak bagi kaum buruh, perawatan kesehatan dan pemberian obat kepada Rakjat.
6. Tidak adanja perhatian samasekali dari fihak pemerintah kepada masaalah golongan minoritet, jang sebagian besar terdiri dari orang<sup>2</sup> jang memiliki perusahaan<sup>2</sup> ketjil dan dari orang<sup>2</sup> intelektuil.

Harus diperdjuangkan oleh PKI supaja segala kelemahan ini dengan se-lekas<sup>2</sup>nja dapat diatasi. Jang mengenai hal produksi dilapangan industri harus diandjurkan kepada kaum buruh, bahwa produksi harus diperbesar se-banjak<sup>2</sup>nja dengan sjarat, bahwa peroduksi dan distribusi serta perdagangan barang<sup>2</sup> milik negara harus diawasi oleh serikatburuh.

Dengan pendek dapat dikatakan, bahwa dalam pekerdjaan se-hari<sup>2</sup> PKI harus membela dengan giat kepentingan<sup>2</sup> Rakjat pekerdja umumnja. Kepada pemerintah harus dituntut dengan tegas oleh PKI, supaja sebab<sup>2</sup> jang dapat menimbulkan pemogokan segera dihilangkan.

Dalam menetapkan kewadjaban tersebut diatas, ditambah dengan kewadjaban melawan imperialisme jang mana sadja dengan tjara jang se-hebat<sup>2</sup>nja, maka kaum Komunis se-kali<sup>2</sup> tidak boleh melupakan bahwa kewadjaban PKI pada saat ini dalam tingkatan revolusi sekarang ini jalah tidak melebihi daripada penjelesaian REVOLUSI NASIONAL atau REVOLUSI DEMOKRASI

BURDJUIS TYPE BARU, sebagai tingkatan persediaan untuk revolusi jang lebih tinggi jaitu Revolusi Sosialis atau Revolusi Proletar.

Pendorong Revolusi Nasional sekarang ini ialah Rakjat progresif dan anti-imperialis seluruhnja terutama sekali klas buruh sebagai pemimpinja dan kaum tani sebagai sekutu klas buruh jang terpenting. Djikalau diantara Rakjat progresif itu tidak ada persatuan, maka revolusi tidak akan menang! Sebaliknja, hanja persatuan jang kuat diantara seluruh Rakjat jang anti-imperialis itu akan membawa Revolusi kita kepada kemenangan.

Wujud satu<sup>2</sup>nja daripada persatuan itu, ialah *Front Nasional* jang disusun dari bawah jang disokong oleh semua Partai dan golongan serta orang<sup>2</sup> jang progresif.

### III

## Front Nasional

Setelah menindjau riwayat gerakan kemerdekaan semendjak permulaan pendudukan negeri kita oleh Djepang hingga kini, maka Polit-Biro menetapkan dengan menjesal bahwa kaum Komunis telah lalai mengadakan *Front Nasional* sebagai sendjata Revolusi Nasional terhadap imperialisme. Walaupun kemudian mereka mulai sadar akan kepentingan Front Nasional itu, akan tetapi kaum Komunis belum faham sungguh<sup>2</sup> tentang hakekat Front Persatuan Nasional dan tentang tjara membentuknja. Beberapa matjam bentuk Front Nasional selama tiga tahun ini telah didirikan, akan tetapi selalu tinggal diatas kertas belaka, bahwa hanja berupa konvensi diantara organisasi<sup>2</sup> atau diantara pemimpin<sup>2</sup> sadja, sehingga djikalau ada sedikit perselisihan diantara pemimpin<sup>2</sup> Front Nasional itu lalu menjebakkan bubarnja. PKI berkejakinan, bahwa pada saat ini Partai klas buruh tidak dapat menjelesaikan sendiri revolusi demokrasi burdjuis ini dan oleh karena itu PKI harus bekerdja bersama dengan partai<sup>2</sup> lain. Kaum Komunis sudah semestinja berusaha mengadakan persatuan dengan anggota<sup>2</sup> partai dan organisasi<sup>2</sup> lain. Satu<sup>2</sup>nja persatuan sematjam itu ialah FRONT NASIONAL. Dalam menjusun ini PKI harus mengambil inisiatif dan dalam Front Nasional itu PKI harus djuga memainkan rol



jang memimpin. Ini se-kali<sup>2</sup> tidak berarti, bahwa kaum Komunis memaksa partai lain atau orang lain supaya mengikutinja, melainkan PKI harus *mejakinkan* dengan setjara sabar kepada orang<sup>2</sup> jang tulus hati, bahwa satu<sup>2</sup>nja djalan untuk mendapat kemenangan ialah membentuk Front Nasional jang disokong oleh semua Rakjat jang progresif dan anti-imperialis. *Tiap<sup>2</sup> Komunis harus jakin benar<sup>2</sup>, bahwa dengan tidak adanja Front Nasional kemenangan tidak akan datang.*

Oleh karena pada dewasa ini telah ada program nasional jang sudah disusun, disetudjui dan diterima pula oleh semua partai, maka tidak salah djika program nasional ini dipakai dengan segera sebagai dasar untuk mewujudkan Front Nasional. Front Nasional jang tulen harus disusun dari bawah, semua anggota partai<sup>2</sup> jang sudah menjetudjui Front Nasional seharusnya memasukinja, setjara individual. Selain daripada itu diberi djuga kesempatan kepada beribu orang jang tidak berpartai dan jang progresif turut serta dalam Front Nasional. Komite<sup>2</sup> Front Nasional, baik didaerah maupun dipusat, harus dipilih setjara demokratis dari bawah. Front Nasional sematjam ini, sekali berdiri, tidak akan mudah hantjur, bahkan tidak terlalu bergantung lagi kepada kehendak pemimpin<sup>2</sup> partai. Front Nasional sematjam itu memungkinkan djuga pengurangan perselisihan politik dan djuga memperketjil adanja oposisi sampai pada batas minimum.

Bersamaan dengan itu, PKI harus berdaja-upaja supaya pemerintah sekarang se-lekas<sup>2</sup>nja diganti dengan pemerintah FRONT NASIONAL jang berdasar atas program nasional dan jang bertanggung djawab. Hanja pemerintah sematjam itulah jang akan berakar kuat dikalangan Rakjat dan sanggup mengatasi kesukaran<sup>2</sup> dalam negeri serta meneruskan perlawanan anti-imperialis setjara konsekwen.

## IV

### PKI dan daerah pendudukan

Polit-Biro menganggap perlu dan memutuskan, bahwa PKI harus sungguh<sup>2</sup> mengatur dan memimpin perlawanan Rakjat terhadap Belanda didaerah pendudukan. Strategi PKI didaerah pendudukan

terutama harus menghalangi Belanda dalam usahanya memperteguh kekuasaannya dan memperbesar produksinya. Kalau Belanda berhasil dalam usahanya itu, maka lambat laun Belanda dapat memadamkan semangat perlawanan Rakjat djelata. Perlawanan jang selalu bertambah, jang dilakukan oleh kaum gerilja didaerah<sup>2</sup> pendudukan di Djawa, di Sumatera dan di-pulau<sup>2</sup> lain harus mendjadi tanda bagi semua Komunis untuk aktif dan berani menjokong dan memimpin perlawanan<sup>2</sup> itu.

## V

### Ideologi

Polit-Biro berpendapat, bahwa kesalahan<sup>2</sup> prinsipiil tsb. diatas terutama disebabkan karena lemahnya ideologi Partai. Kelemahan<sup>2</sup> tsb. diatas harus Iekas diperbaiki. Dengan tidak adanya teori revolusioner tidak ada gerakan revolusioner kata Lenin. Pendapat Lenin ini terbukti kebenarannya dalam pekerdjaan kita. Oleh karena teori Marxisme-Leninisme adalah suatu ilmu (wetenschap) jang tertinggi, maka iapun harus dipeladjadi sebagai wetenschap djuga. Teori kita ini meneguhkan kejakinan, menadjamkan kewaspadaan, membesarkan keberanian dan memudahkan pekerdjaan kita dalam keadaan jang sulit. Partai Komunis jang benar<sup>2</sup> berdasar atas peladjaran<sup>2</sup> MARX, ENGELS, LENIN dan STALIN tidak akan mudah djatuh dalam keadaan kebingungan, dan bagaimanapun djuga sulitnya keadaan dan suasana politik Partai Komunis selalu akan mendapat djalan jang tepat untuk mengatasinya. Berhubung dengan itu, mulai sekarang djuga tiap Komunis DIWADJIBKAN membatja dan mempeladjadi setjara sistematis teori revolusioner dan diwadajibkan mengadakan kursus<sup>2</sup> dikalangan kaum buruh dan kaum tani, agar supaja dengan djalan demikian mereka selalu dapat menghubungkan teori dan praktek dengan erat. Teori jang tidak dihubungkan dengan massa, tidak dapat merupakan kekuatan, akan tetapi sebaliknya teori jang berhubungan erat dengan massa, merupakan kekuatan jang maha hebat.

Kawan Stalin mengatakan, bahwa tidak ada satu bentengpun djuga jang tidak dapat direbut oleh kaum Bolsjewik. Maka itu yakinlah, bahwa kaum Bolsjewik Indonesia akan dapat merebut benteng jang terantjam bahaja dihadapan mereka, jaitu benteng Indonesia

Merdeka.

*Polit-Biro Central Comite  
Partai Komunis Indonesia*

*Djokjakarta, Agustus 1948.*

*Catatan:*

) Pikiran jang orisinil dari Kawan Musso tidak menghendaki diadakannya fusi tetapi menghendaki supaya Partai Sosialis dan PBI dibubarkan sedangkan anggotanya setelah disaring supaya meleburkan diri dalam PKI.

ooo0ooo